

# Paradigma

Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan

**Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi dan Peluang Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Demokratik**

*Aryanta Nugraha*

**Internet Politik: Analisis Historis Peran Teknologi Media Baru dalam Demokratisasi Indonesia**

*Prayudi*

**Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam Pembebasan Wartawan Metro TV di Irak**

*Mala Mardialina*

**Dampak Penguatan Usaha Mikro terhadap Penguatan Perempuan (Studi pada Kelompok Perempuan Usaha Mikro di Propinsi DIY)**

*Asih Marini Wulandari*

*Ida Susi Dewanti*

**Kewirausahaan, Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi**

*Humam Santosa Utomo*

**Vladimir Putin dan Kebijakan Luar Negeri *Near Abroad* Rusia: Perspektif Kawasan**

*June Cahyaningtyas*

## Daftar Isi

**133 - 140**

**Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi dan Peluang Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Demokratik**

*Aryanta Nugraha*

**141 - 149**

**Internet Politik: Analisis Historis Peran Teknologi Media Baru dalam Demokratisasi Indonesia**

*Prayudi*

**150 - 161**

**Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam Pembebasan Wartawan Metro TV di Irak**

*Mala Mardialina*

**162 - 172**

**Dampak Penguatan Usaha Mikro terhadap Penguatan Perempuan (Studi pada Kelompok Perempuan Usaha Mikro di Propinsi DIY)**

*Asih Marini Wulandari*

*Ida Susi Dewanti*

**173 - 179**

**Kewirausahaan, Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi**

*Humam Santosa Utomo*

**180 - 188**

**Vladimir Putin dan Kebijakan Luar Negeri *Near Abroad* Rusia: Perspektif**

*June Cahyaningtyas*

# PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DAN PELUANG PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DEMOKRATIK

Aryanta Nugraha

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta

E-mail: aryanta\_nugraha@yahoo.com

## **Abstract**

*There has been a growing important of the Information and Communication Technologies (ICT's) as an instrument to resolve the problems in participatory, inresponsivity and inaccountability of a democratic regime. This article not only discusses any possibilities of the use of the new ICT's as a medium to find a healthy democracy but also tries to map out some bad impacts of them to the political activities that might strengthened the exclusivity of political activities related to the digital gap and bias on information distribution in the society. This article argues that the use of ICT's to support democratic governance could be maximizing if there is a proper institutional design that involves many democratic sectors in the society.*

*Key words: ICT's, democracy, governance*

## **Pendahuluan**

Peranan dan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat mutakhir. Teknologi itu terutama telah dimanfaatkan oleh sektor privat dalam rangka mempercepat pertukaran komersial. Penggunaan prefik "e" menjadi sangat familiar dalam kehidupan praktis, seperti dalam perdagangan, kesehatan, perbankan dan bahkan pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan, teknologi ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah (pusat maupun daerah) untuk meningkatkan efisiensi internal, membangun komunikasi yang baik dengan organisasi rekanan untuk meningkatkan layanan pada masyarakat. Teknologi juga bisa dimanfaatkan oleh pemegang otoritas untuk membuka saluran komunikasi dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan saluran partisipasi.

Dengan demikian sangat beralasan ketika muncul wacana reformasi prosedur dan tata kelola pemerintahan dengan mempertimbangkan potensi TIK sebagai medium informasi dan komunikasi. Pertanyaannya, apakah kemajuan dalam TIK mampu meningkatkan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang demokratik? Pertanyaan ini mengemuka karena: (1) Eksistensi rezim

demokratik menunjukkan berbagai kelemahan dalam hal perwakilan (*representativeness*), responsivitas dan akuntabilitas. Sistem perwakilan dalam demokrasi cenderung menonjolkan kepentingan partisan terkait dengan konstituen dan mengabaikan kepentingan bersama (*general will/ interest*) (Stellen, 2001: 1). Pun derajat responsivitas dan akuntabilitas sering diukur dari upaya memenuhi kebutuhan konstituen atau partai yang menaungi ketimbang kepada warga negara yang memberikan mandat, (2) Pengorganisasian tata kelola pemerintahan demokratik menghadapi persoalan-persoalan yang kompleks. Proses dalam tata kelola pemerintahan semakin lama semakin terfragmentasi dan rumit sehingga sulit bagi warga negara awam untuk mengikuti dan memahaminya. Selain itu institusi-institusi demokrasi yang sudah terbangun pun semakin kompleks sementara saluran komunikasi politik konvensional cenderung melemah. Hal ini diperparah dengan semakin melebarnya kesenjangan antara elit politik dengan warga negara. Kebebasan untuk mengakses informasi

Ada sementara keyakinan bahwa TIK bisa memfasilitasi dan mendorong kesempatan bagi interaksi publik dan partisipasi demokratik melalui penyediaan akses informasi publik. Pemanfaatan TIK akan mendorong perbaikan dalam prosedur pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Optimisme itu diekspresikan dalam berbagai proyek pengembangan konsep *e-government*, *e-democracy* dan *e-governance*.

Tulisan ini akan mengeksplorasi berbagai peluang peranan TIK terutama internet dalam mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan demokratik. Perhatian utama paper ini adalah aspek-aspek tata kelola pemerintahan (*governance*) bukan pada organisasi maupun kapasitas TIK. Bagian pertama paper ini akan menggali berbagai karakter spesifik dari TIK dan pengaruhnya terhadap aktivitas politik, bagian kedua akan membahas berbagai konteks terkait dengan bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan untuk mendukung demokrasi melalui perluasan partisipasi bagian keempat akan membahas mengenai berbagai konteks dan pengaruh teknologi terhadap tata kelola pemerintahan, dan bagian terakhir akan mendiskusikan berbagai kelebihan dan keterbatasan teknologi bagi partisipasi warga negara.

## Pembahasan Teknologi dan Demokrasi

Meningkatnya wacana TIK (terutama internet) dengan tata kelola pemerintahan ini terjadi karena; (1). Ciri-ciri spesifik dari TIK (terutama internet) yang memiliki potensi besar bagi proses demokrasi dan (2). Semakin meningkatnya persoalan irresponsivitas dan inakuntabilitas pemerintahan demokrasi perwakilan (defisit demokrasi).

### Karakteristik TIK dan Internet

Setelah ditemukannya teknologi telematik (integrasi/ sintesa teknologi komputer dengan teknologi informasi), signifikansi perkembangan teknologi terhadap aktivitas politik mulai meningkat. Pengaruh perkembangan TIK terhadap aktivitas politik dan demokrasi bisa dilihat dari berbagai karakteristik TIK baru yang memiliki relevansi dengan aktivitas politik yaitu;

1. TIK baru menembus semua batasan-batasan dalam volume informasi yang dipertukarkan.
2. TIK baru memungkinkan pertukaran informasi dalam waktu yang cepat (*real time and space*).
3. meningkatkan kapasitas konsumen untuk mengontrol atas pesan apa yang mereka terima dan kapan
4. meningkatkan kapasitas pengirim terhadap audiens yang menerima pesan-pesan tertentu
5. TIK baru mendesentralisasi kontrol atas komunikasi massa
6. Adanya karakter yang interaktif dari TIK.

K. Laudon (1977) mengklasifikasikan TIK ke dalam tiga kategori: teknologi transformasi data, seperti Komputer yang merupakan alat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah informasi; teknologi partisipasi massa seperti radio dan televisi (dalam format konvensional) yang mentransmisikan informasi dari satu sumber kepada jutaan orang; dan teknologi interaktif yang memungkinkan aliran komunikasi horizontal diantara individu dan kelompok, seperti telepon, bentuk interaktif dari program televisi dan radio, serta jaringan komputer yang interaktif yang memungkinkan komunikasi melalui medium komputer. Pengaruh teknologi dalam meningkatkan partisipasi dari tiga kategori TIK tersebut terletak pada bagaimana perkembangan TIK semakin menempatkan si penerima informasi tidak lagi sebagai penerima pasif tetapi dapat secara aktif berkomunikasi di dalamnya, bahkan mengontrol aliran komunikasi (Horrock & Pratchett, 1995; 1219).

Internet merupakan bentuk perkembangan TIK mutakhir yang dianggap berpotensi paling besar dalam mempengaruhi aktivitas politik. Hal ini karena karakter spesifik dari internet yakni kecepatan dan volume informasi, pengguna memegang kontrol, terdesentralisasi dan bersifat interaktif. Karakter ini secara potensial berkontribusi terhadap munculnya masyarakat demokratik.

Sifat desentralisasi, misalnya, dinilai mendorong munculnya lingkungan yang lebih majemuk ketimbang teknologi sebelumnya seperti yang telah diakibatkan oleh televisi dan radio. Karakter interaktif dari internet akan

pendapat umum selalu dianggap sebagai simbol demokrasi yang sebenarnya dan cara paling praktis untuk menguatkan kepentingan individual dalam pemerintahan. Perkembangan TIK berpotensi untuk meraih ide pelaksanaan demokrasi plebisitarian, mengingat kemampuan TIK dalam mengatasi kendala jarak dan waktu. Masyarakat yang terkomputerisasi secara teknis akan sangat memungkinkan pelaksanaan referendum dalam banyak aspek kebijakan sehingga dianggap merupakan salah satu cara untuk mempersempit jarak tirani dan demokrasi yang sebenarnya.

Namun demikian imajinasi demokrasi plebisitarian dengan memanfaatkan TIK bukannya tanpa resiko. Ketika TIK mampu mengatasi jarak, waktu dan volume informasi, partisipasi politik akan tereduksi hanya sebagai tindakan pribadi yang pasif hanya dengan mendaftarkan dan memasukkan opininya pada suatu isu tertentu. Nilai-nilai diskusi tatap muka dan musyawarah akan terkikis dan politik menjadi semacam pengaturan kelembagaan untuk mengekspresikan dan memuaskan kepentingan individual. Karena hanya ingin mendorong tingkat partisipasi langsung proyek e-demokrasi plebisitarian berpotensi mereduksi makna wacana interaktif yang merupakan komponen penting dalam masyarakat demokrasi maju. Kemampuan untuk memilih melalui peralatan elektronik dipandang lebih penting ketimbang membuat warga negara *well-informed*, sadar dan memiliki pilihan rasional atas pilihannya.

TIK juga dipandang mampu membuat model demokrasi perwakilan menjadi semakin responsif. TIK diharapkan mampu membuat informasi luas tersedia (*available*) bagi berbagai kalangan yang berbeda, untuk aneka ragam tujuan. Teknologi baru juga dipandang akan memberi akses informasi yang luas kepada warga negara untuk disimpan, diproses secara cepat murah dan efektif. Perkembangan berbagai komunitas jaringan (*community net, blogger* dll) dianggap akan mendorong dan mempromosikan wacana kemajemukan yang merupakan kultur penting dalam sistem demokrasi perwakilan.

Namun demikian pemanfaatan TIK sering pula dipandang akan menjadi mekanisme yang semakin menambah bias distribusi informasi

diantara berbagai kelompok masyarakat. TIK akan berpotensi menjadi media penumpukan informasi yang akan menambah lebar asimetri distribusi informasi dan distribusi kekuatan, manakala akses dan kontrol informasi bersifat elitis, sehingga TIK justru akan menjadi alat untuk menghalangi demokrasi.

TIK juga dipandang mampu mewujudkan mimpi untuk membentuk demokrasi komunitarian (*communitarian democracy/ deliberative democracy*). Demokrasi komunitarian merupakan model demokrasi yang bermaksud mempromosikan kesesuaian antara kepentingan individual dengan kepentingan bersama. Hal ini diyakini pandangan bahwa tujuan demokrasi bukan untuk membuka peluang kepemimpinan mayoritas atas kepentingan minoritas secara antagonistik, melainkan suatu politik persuasi untuk menciptakan dan memelihara kebaikan bersama (Abrahamson *et. al.*, 1988; Rosenberg, 2004).

Sejalan dengan tujuan tersebut, TIK dipandang sangat tepat untuk mempromosikan demokrasi. Pemanfaatan TIK akan memungkinkan pemberian suara, opini dan voting secara langsung (seperti halnya model plebisit). Selain itu TIK juga akan menyediakan sarana untuk mendorong penyebaran informasi dan pendidikan kepada warga negara. Melalui TIK, akan dimungkinkan medium baru dimana masyarakat akan mampu membentuk komunitas melintasi jarak, ruang dan waktu. TIK seperti televisi kabel, jaringan komputer bisa difungsikan sebagai medium untuk melakukan debat dua arah dan diskusi di seputar isu-isu tertentu yang membutuhkan kumpulan opini. Dalam konteks komunitarianisme inilah TIK dipandang sangat suportif terhadap demokrasi.

Mekanisme utama TIK terutama internet dalam mendukung demokrasi sangat dimungkinkan oleh volume dan kecepatan informasi serta sifat interaktif dan desentralisasi informasi yang dihasilkan oleh TIK. Mekanisme itu memungkinkan warga negara mendapatkan informasi, mendiskusikan, melakukan konsultasi dan mengembangkan komunitas untuk membangun kesesuaian kepentingan bersama, dalam koridor nilai dasar demokrasi (partisipasi, persamaan, dan kebebasan).

Dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa TIK merupakan sarana penting dalam komunikasi politik demokratik terutama dalam penyediaan informasi dan akses informasi. Kemiskinan informasi dan kesenjangan informasi merupakan persoalan fundamental bagi kesehatan sistem demokrasi modern. Dalam masyarakat demokratik akses informasi merupakan variabel yang sangat menentukan bagi perkembangan dan legitimasi demokrasi. Informasi adalah pengetahuan dan pengetahuan adalah *power* (kekuatan/ kekuasaan). Ketika komputer menjadi media informasi dan komunikasi, maka komputer bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kandungan plebisitarian, meningkatkan responsivitas sistem perwakilan dan pengembangan deliberasi berbagai kebijakan dalam sistem politik demokratik.

### Problem Tata Pemerintahan Demokratik dan peran TIK

Dalam wacana sistem politik demokrasi muncul kecenderungan untuk menggeser penekanan dari pemerintah (*government*) ke tata pemerintahan (*governance*) baik dalam tataran akademis maupun kebijakan. *Governance* adalah penjabaran yang secara berbeda dari desain kelembagaan demokrasi liberal. *Governance* merujuk pada substansi, semangat dan unsur-unsur dasar yang harus ada dalam institusi pemerintah (*government*). Dari sini maka istilah *good governance* sering disepadankan dengan berbagai kombinasi elemen seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, *rule of law* dan responsivitas (Santosa dalam Afifi, *et. al*, 2005: 3).

*Governance* itu sendiri ternyata dipahami secara beragam dengan pengertian dan penekanan yang berbeda. *Governance* menyangkut kapasitas pemerintah dalam mengalokasikan berbagai tujuan kebijakan publik. Kapasitas itu membutuhkan keterlibatan berbagai macam aktor dan faktor sosial yang luas. Tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan adalah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara sudah sangat kompleks dalam skala maupun jangkauannya, sehingga dibutuhkan keterlibatan berbagai aktor yang memiliki keahlian, perspektif dan sumber daya yang bersifat komplementer. *Governance*

juga menekankan pada pentingnya agensi, interaksi antar aktor melalui kemitraan maupun jaringan. Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan pergeseran hubungan antar pemerintah (politisi yang terpilih melalui pemilu) dengan rakyat dalam rangka mencari solusi permasalahan masing-masing. Paling tidak ada empat perspektif yang menggarisbawahi aspek yang berbeda dari *governance* (Karakaya, 2003: 3-4):

Pertama, *perspektif organisasi*. Perspektif ini memandang bahwa *governance* adalah persoalan pembentukan jejaring dan kemitraan kerja sama di antara berbagai organisasi, menyatukan berbagai keahlian dan sumber daya untuk menyelesaikan persoalan bersama atau mencapai tujuan bersama. Proses ini akan menyebabkan perubahan dalam peranan manajer dan staf-nya dalam pemerintahan, sehingga cenderung menimbulkan dilema dalam tujuan pemerintahan, dalam keterlibatan masyarakat, yakni dilema efisiensi dan partisipasi.

Kedua, *perspektif warga negara*. Departementalisasi pelayanan pemerintah seringkali dibuat dan dijalankan semata-mata atas pertimbangan efisiensi dari cara pandang pemerintah. Perspektif ini menyarankan agar dalam tata kelola pemerintahan perlu memperhatikan pandangan warga negara sebagai *customer/user*. Dengan demikian aspek-aspek pelayanan sebaiknya didasarkan pada kebutuhan bukan atas departemen. Namun demikian perspektif ini menemui dilemma ketika warga negara justru akan kesulitan untuk memahami dan mempengaruhi berbagai keputusan.

Ketiga, *perspektif politik*. Pandangan ini menganggap bahwa tata kelola pemerintahan adalah persoalan negosiasi/ bargaining kekuatan. Hubungan kekuatan yang kompleks seringkali mereduksi kekuatan politisi terpilih. Para politisi harus bekerja dalam bingkai struktural baru dan berjuang untuk menemukan peran mereka dalam kerangka kerja yang melibatkan warga negara. Hal ini bukannya tanpa kendala. Persoalan yang mengemuka dari cara pandang ini adalah persoalan akuntabilitas. Ketika jejaring *governance* menyatu dalam proses pengambilan kebijakan, siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban.

*Keempat, perspektif demokratik.* *Governance* menurut pandangan ini adalah soal keterlibatan berbagai komunitas yang berbeda untuk memerintah diri mereka sendiri. Asumsi awalnya adalah, setiap komunitas bisa berkontribusi terhadap suatu keputusan. Stokes (1994) (dalam Karakaya, 2005: 6-8) menunjukkan tiga karakteristik dasar *good governance*: (1) kemauan untuk membuka saluran bagi partisipasi, (2) *governance* harus menyatukan berbagai arena menuju musyawarah, dan (3) *governance* harus menciptakan kapasitas untuk mengintegrasikan tindakan berbagai aktor.

Persamaan dan kebebasan politik merupakan nilai dasar dalam demokrasi. Namun demikian bagaimana nilai dasar itu diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam praktik, sering muncul berbagai perbedaan. Membangun tata pemerintahan (*governance*) demokratik adalah bagaimana mengorganisasi sistem demokrasi dalam substansi pemerintahan. Persoalan ini mencakup pengembangan institusi yang mampu memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif yang konsisten antara nilai-nilai fundamental individu (otonomi dan kesamaan) dan kepentingan bersama (*common interests*).

Menurut Torpe (2006), paling tidak ada dua konsep yang membahas hal ini. Pertama, konsep demokrasi agregatif berpandangan bahwa preferensi individual merupakan kemungkinan pertimbangan tertinggi dalam proses pengambilan kebijakan. Pandangan ini didasarkan pada filsafat utilitarian dan pandangan pilihan rasional yang menyatakan bahwa pihak yang kalah mematuhi segala konsekuensi karena memiliki harapan bahwa melalui sistem yang sama, pihak yang sekarang kalah mungkin akan menjadi pemenang dan konsekuensi sebaliknya akan diterima oleh pihak yang lain. Namun demikian pandangan teori pilihan rasional ini sulit untuk diterapkan dalam kondisi di mana masyarakat terfragmentasi, sehingga pihak minoritas hampir tidak pernah memiliki harapan untuk memenangkan pemilu. Termasuk dalam konsep demokrasi agregatif ini adalah model demokrasi kompetitif dan demokrasi populis.

Salah satu kecenderungan dalam tata pemerintahan berdasarkan konsep demokrasi

agregatif adalah adanya potensi konflik antara preferensi individual dengan kepentingan kolektif. Mengapa seseorang atau sekelompok orang (minoritas) harus menerima suatu keputusan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan kepentingannya? Mengapa pihak yang kalah dalam pemilu harus menerima dan mematuhi segala konsekuensi meskipun tidak sejalan dengan kepentingannya? Artinya sistem demokrasi modern secara inheren mengandung problem legitimasi dan ketidakpatuhan.

Kedua, konsep demokrasi integratif. Pandangan ini menyatakan bahwa individu merupakan bagian dari masyarakat. Dengan demikian, proses pembentukan kepentingan adalah proses kolektif berbasis interaksi menyangkut hak dan kewajiban individu dan masyarakat. Termasuk dalam konsep integratif ini adalah model demokrasi deliberatif dan demokrasi partisipatoris.

Pengembangan tata pemerintahan demokratik membutuhkan desain kelembagaan yang mampu menciptakan kesempatan partisipasi penuh dan setara bagi warga negara secara bersama, bekerja sama untuk mendefinisikan dan menilai berbagai problematika berikut solusinya. Tata pemerintahan yang demikian adalah tata pemerintahan yang mempromosikan sistem perwakilan yang dimana pertimbangan dan musyawarah (bukannya voting) menjadi kunci legitimasi dan kepatuhan terhadap demokrasi lebih memperhatikan pertimbangan dari warga negara (Rosenberg, 2004).

Tata pemerintahan yang deliberatif itu membutuhkan berbagai prasyarat antara lain; tingkat kewarganegaraan dan adanya komunitas yang kuat yang mau berpartisipasi dalam menyuarakan kepentingan dan semangat untuk mengembangkan nilai dan kebaikan bersama (*common good*) sebagai pertimbangan utama pengambilan kebijakan. Kalau tidak ada tuntutan untuk berpartisipasi dan musyawarah maka aspek demokratik dari *governance* dengan sendirinya akan sangat terbatas. Oleh karena itu untuk mendukung mekanisme *governance* dibutuhkan mekanisme lain yang mampu menciptakan sense kewarganegaraan, rasa kebersamaan dan semangat untuk mengambil peran.

Aspek komunikasi mempunyai peranan yang besar dalam membangun tata pemerintahan deliberatif. Proses komunikasi merefleksikan struktur hubungan di antara komunikan berdasarkan kapasitas komunikatif dari individu yang terlibat. Sangat jarang proses komunikasi bersifat netral. Dengan semangat untuk mencari kebaikan bersama maka distorsi komunikasi bisa dihindari.

Berkaitan dengan TIK, perspektif *governance* demokratik membutuhkan teknologi untuk membuka partisipasi secara *online* dan membangkitkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat. Hal ini bisa dicapai dengan membuka polling *online*, forum diskusi *online* dan berbagai forum konsultasi *online*. Kunci keberhasilan pengaruh pemanfaatan TIK terhadap demokrasi tergantung pada seberapa besar kemampuan TIK dalam membangun pemberdayaan terhadap warga negara. Keberdayaan merupakan alat bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam struktur pengambilan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan itu merupakan efek dari akses informasi. TIK terutama internet berpotensi menciptakan alternatif ruang wacana dan forum-forum alternatif yang mengembangkan berbagai wacana yang beragam. Kualitas partisipasi membutuhkan distribusi informasi yang sama dan merata serta kemampuan memanfaatkan informasi tersebut secara efektif. Kesenjangan informasi akan antar anggota masyarakat dan strategi menyelesaikan persoalan kemiskinan informasi melalui pemanfaatan TIK yang aksesibel merupakan cara fundamental untuk mengembalikan "kesehatan" demokrasi modern (Horrock & Pratchett, 1995: 12-24).

### Problematika Penerapan TIK

Harus disadari bahwa TIK hanyalah alat dan sarana. TIK hanya menawarkan cara berkomunikasi baru yang sangat potensial untuk mengembangkan gagasan, informasi dan mempermudah cara berpartisipasi. Teknologi akan terus berkembang dan sistem politik demokratik memiliki kesempatan perbaikan melalui pemanfaatan teknologi. Sementara itu persoalan sosial dan politik tidak akan dengan mudah diselesaikan dengan hanya memanfaatkan

perkembangan teknologi semata. Ketersediaan akses informasi dan kemudahan untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan melalui format elektronik, tidak cukup untuk mendorong antusiasme partisipasi.

TIK tidak bisa menyelesaikan persoalan motivasional, karena penerapan TIK terutama internet itu sendiri sering menimbulkan berbagai persoalan sosial dan politik (Karakaya, 2005: 8-9). Persoalan sosial muncul terkait dengan eksklusivitas (tidak melibatkan) segmen masyarakat tertentu, ketika teknologi dimanfaatkan dalam arena politik. Fenomena ini muncul akibat adanya: (1) "kesenjangan digital" antara orang yang bisa memanfaatkan internet dan tidak, (2) TIK baru dalam pemanfaatannya sangat tergantung teknologi lama terutama telepon, sehingga akses internet tetap merupakan privilese kelompok kaya, dan (3) kecenderungan pemanfaatan TIK baru terutama internet dalam pola konsumsi media (Alexander, 2003: 1).

Sinyalemen ini didukung beberapa penelitian misalnya, Rita Marcella, Baxter dan Moore (2003) yang menunjukkan bahwa penerapan TIK dalam informasi dan komunikasi di parlemen Inggris tidak serta merta meningkatkan partisipasi dan komunikasi via TIK. Kebanyakan kelompok orang tua dan tidak memiliki pengalaman dalam TIK tidak mau dan tidak mampu memanfaatkan kesempatan itu (Marcela, Baxter & Moore, 2003). Penelitian lain oleh Stephen Ward, Gibson & Lusoli (2005) menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK dalam upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam politik, hanya menarik bagi sekelompok minoritas masyarakat yang sebelumnya memang telah aktif dalam politik

Problematika lain adalah problem politik. Problem ini terkait dengan strategi pemerintah dalam memanfaatkan teknologi. Kemauan pemerintah untuk menerapkan teknologi sangat tergantung pada kekuatan pasar yang mau berinvestasi dalam teknologi ini. Hal ini menyebabkan bias infrastruktur, terutama di wilayah yang dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi (misalnya karena terpencil). Hal ini menyebabkan keterbatasan sarana untuk mengakses TIK. Kalau demikian yang terjadi maka fora partisipasi dan konsultasi yang diharapkan muncul secara *online* hanya bisa



dimanfaatkan oleh kalangan tertentu saja. Seperti sinyalemen Horrock dan Pratchett (1995) menyatakan bahwa meskipun memiliki konsekuensi besar bagi demokrasi, perkembangan TIK bersifat ambigu. Perkembangan TIK membawa kesempatan maupun ancaman bagi demokrasi. Pada satu sisi perkembangan TIK menjanjikan munculnya masyarakat kaya informasi, yakni masyarakat yang memiliki akses informasi yang luas dari berbagai sumber. Akses informasi yang luas akan memperluas perdebatan pada setiap isu pengambilan keputusan, antara masyarakat dan pemerintah melalui media interaktif. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa TIK meningkatkan arus partisipasi warga negara. Pada sisi lain perkembangan TIK juga dipandang sebagai ancaman bagi demokrasi karena TIK memperkuat bias distribusi pengetahuan dan informasi, mengurangi partisipasi terhadap masyarakat hanya kepada partisipan yang berjarak dan relatif kecil yang seringkali hanya bersikap reaktif terhadap isu-isu yang sedang hangat.

TIK juga bisa dimanfaatkan berbagai sistem politik. Seperti yang ditunjukkan oleh Marcus Alexander (2003), perkembangan internet di negara-negara yang sedang menjalani transisi demokrasi seperti Rusia tidak berkontribusi terhadap kebebasan berbicara dan demokratisasi lebih lanjut. Hal ini karena pemerintah tidak hanya mampu mengontrol internet, tetapi juga secara aktif mencegah kebebasan politik dan mengontrol ruang informasi publik dengan membatasi muatan *provider* dan *user* melalui aturan dan kompetisi komersial.

Untuk meningkatkan "kesehatan" tata pemerintahan demokratik, faktor TIK saja tidak cukup. TIK hanya menjadi faktor "enable" dan memfasilitasi partisipasi warga negara. Di luar itu ada banyak variabel yang mempengaruhi partisipasi. Peningkatan partisipasi membutuhkan pengembangan institusi: (1) Penerapan TIK membutuhkan desain institusional agar tidak terjadi gejolak antara tujuan yang ingin diraih dengan institusi lama/ yang sudah ada, (2) Waktu penerapan yang tepat, dan (3) Sikap dan penerimaan aktor yang terlibat baik individu maupun organisasi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abramson, J.B, *et al*, 1998, *The Electronic Commonwealth: The Impact of New Media Technologies on Democratic Politic* Basic Book Inc.
- Afifi, Subhan, Nikolaus Loy, 2005, Susilastuti D.N (ed), *Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta Press 2005
- Dahl, Robert, 1973, *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven, Yale

### Penelitian/Makalah

- Alexander, Marcus," The Internet in Putin's Russia: Reinventing Technology of Authoritarianism," *Paper presented at Annual conference of PSA, University of Leicester, UK, April 15-17, 2003*
- Chadwik, Andrew, "E-government and E-Democracy: A Case for Convergence", *Paper presented to the panel of Public Policy in the E-government Era (II), Political Studies Association Annual Conference, University of Leicester, 15-17 April, 2003*
- Karakaya, Rabia," The Use of Internet for Citizen Participation: Enhancing Democratic Local Governance," *paper to Political Studies Association Annual Conference, University of Leicester 15-17 April 2003*
- Marcela, Rita, Baxter & Moore," The Impact of new technology on The Communication of Parliamentary information," *paper presented at annual conference of PSA, University of Leicester, April 15-17 2003*
- Rosenberg, Shawn W., 2004, "Reconstructing the Concept of Democratic Deliberation," *Center for the Study of Democracy University of California, Irvine, paper 04'02*
- Torpe, Lars, *et al*, 2006, *Digital Local Democracy. Experiment with net based participation and dialogue in civil society and local governance," Project of Media and Democracy in the network society MODINET*
- Ward, Stephen, *et. al*, 2005, "Old Politics New Media: Parlement, The Public and The

---

Internet,” *Paper presented to Political Studies Association Conference University of Leeds, 5-7 April 2005*

#### **Sumber Internet**

- Chadwick, Andrew,” The Internet, Political Mobilisation and Organization Hybridity: ‘Deanspace’, MoveOn.org and the 2004 US Presidential campaign,” *Paper presented to Political Studies Association of The UK Annual Conference, University Leeds 5<sup>th</sup>-7<sup>th</sup>, 2005*, [www.psa.ac.uk/pdetails.asp?panelis=117](http://www.psa.ac.uk/pdetails.asp?panelis=117)
- Horrock, Ivan & Lawrence Pratchett, “Electronic Democracy: Central Themes and Issues”, [www.Clubofamsterdam.com/content/article/](http://www.Clubofamsterdam.com/content/article/). Atau di [www.psa.ac.uk/conferenceproceeding/1995](http://www.psa.ac.uk/conferenceproceeding/1995)
- Stellen, Ignace,” ICts and the Future of Democracy,” *International Journal of Communication Law and Policy*, Winter 2000/2001. [www.ijclp.org](http://www.ijclp.org).
- Yang, Goubin,” Information Technology and Grassroot Democracy; A Case Study from Environmental Activism in China,” *Paper Presented at The Fourth Annual Kent State Symposium on Democracy*, [www.upress.kent.edu/Nieman/Information\\_Technology.htm](http://www.upress.kent.edu/Nieman/Information_Technology.htm)

